



Kesal dengan Janji Pemerintah, Warga 14 Desa di Lebak Banten Patungan Bangun Jembatan



(Sumber: www.regional.kompas.com)

Warga desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten membangun jembatan sendiri dari dana patungan. Jembatan tersebut berada di ruas jalan milik provinsi namun pembangunannya diambil alih oleh warga setelah jembatan darurat yang disediakan oleh pemerintah kerap hanyut. Terletak di Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jembatan tersebut merupakan jalur utama di Banten untuk menghubungkan utara Lebak dan selatan di bagian timur bahkan hingga ke Sukabumi.

Jembatan putus sejak banjir bandang awal 2020 lalu. Namun hingga saat ini jembatan permanen belum kunjung dibangun. Sebagai akses pengganti, Pemprov Banten membangun jembatan darurat, tapi jembatan kerap hanyut dan tidak bisa dilalui saat sungai Ciberang meluap. Itu berulang kali terjadi saat hujan turun. Kesal karena akses terputus saat sungai meluap, warga berinisiatif membangun jembatan sendiri. Warga kemudian patungan hingga terkumpul ratusan juta rupiah untuk bangun jembatan. "Ini sudah hari kesepuluh dibangun, gotong royong warga turun semua, dananya juga swadaya," kata Khatib, warga setempat kepada Kompas.com di Ciladeun, Jumat (16/4/2021).

Khatib mengatakan warga turun tangan membangun jembatan lantaran sudah jengkel dengan kondisi jembatan darurat saat ini. Kata dia, warga juga sudah bosan menunggu kepastian dari pemerintah kapan jembatan permanen dibangun. "Sudah jengkel lah, pusing lihatnya, kalau meluap kami tidak bisa melintas, bahkan banyak warga yang hendak melintas bawa kendaraan roda empat harus



menginap nunggu sungai surut," kata Khatib. Uang yang dikumpulkan oleh warga dari hasil swadaya. Kata Khatib sudah dikumpulkan berbulan-lalu. Warga seikhlasnya menyumbang sesuai kemampuan dari Rp 50.000 hingga jutaan rupiah.

Tidak hanya warga di sekitar jembatan yang menyumbang, kata dia, sumbangan juga datang dari warga lain bahkan di kecamatan sekitar yang juga menggunakan jembatan ini untuk mobilitas. "Info dari laporan keuangan, ratusan juta terkumpul, yang saya tahu dari Desa Lebaksitu saja Rp 100 juta, Ciladaeun Rp 60 juta," kata Khatib. Sementara total desa yang menyumbang sekitar 14 desa di tiga kecamatan yakni Kecamatan Lebakgedong, Sobang dan Cibeber. Kepala Desa Ciladeun, Yayat, membenarkan adanya pengumpulan dana dari masyarakat untuk membangun jembatan. Kata dia keinginan warga sudah tidak bisa dibendung lantaran merasa terlalu lama menantikan dibangunnya jembatan oleh pemerintah. "Betul, dibangun swadaya oleh masyarakat, warga antusias membangun, minimal bisa dilalui lagi," kata Yayat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon.

Yayat mengatakan, ada 14 desa yang patungan dana membangun jembatan tersebut. Total nilainya dia tidak bisa memastikan, namun kata dia, tidak hanya dalam bentuk uang saja, ada juga warga yang menyumbang barang. "Macam-macam, ada yang sumbang solar untuk excavator, sumbang material bronjong, kayu dan lain-lain," kata Yayat. Aksi warga membangun jembatan sendiri, kata Yayat, sudah diketahui oleh pihak provinsi, kata dia, beberapa waktu lalu ada perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Banten yang datang. Bahkan, kata Yayat, pihak PU meminjamkan excavator kepada warga untuk membangun jembatan tersebut. "Mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena keinginan warga, karena belum bisa dipastikan juga kapan jembatan permanen akan dibangun," kata Yayat.

Sementara dikonfirmasi terpisah juru bicara Gubernur Banten, Ujang Giri, mengatakan jembatan tersebut rencananya akan dibangun Mei tahun ini. Saat ini kata dia, sedang dalam proses tender. "Akhir April tahun 2021 ini ditargetkan sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan pemenang tender. Awal Mei bisa dibangun, target selesai November 2021," kata dia. Dia mengungkapkan jembatan tersebut sebetulnya akan dibangun pada 2020 lalu, namun batal dilakukan lantaran ada pandemi. "Tahun 2020 sudah dianggarkan, tapi batal karena *refocusing*¹ akibat Covid-19," kata

¹ "Untuk *refocusing* rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan



Ujang.

Sumber Berita:

www.regional.kompas.com, Kesal dengan Janji Pemerintah, Warga 14 Desa di Lebak Banten Patungan Bangun Jembatan, 16 April 2021

Catatan:

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813 SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengaman Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, yaitu pada:

- a) Ketetapan Keputusan KEDUA huruf c, menyatakan bahwa Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - (1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - (2) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - (3) Pengadaan tanah;
 - (4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - (5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - (6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
- b) Ketetapan Keputusan KETIGA menyatakan bahwa selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dengan penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk mendanai:
 - (1) Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien CCOVID-19

lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direalokasi," jelas Menkeu (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>)



**Sub Bagian Hukum
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten**

- (2) Penyediaan jaring pengaman *sosial/social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
- (3) Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.